

ABSTRAK

Lutfi, 21382072061, **Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Pembentukan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu Iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan**, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Umi Supratiningsih, S.H., M. Hum.

Kata Kunci: *Siyasah Syar'iyah*, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021, Pegawai Aparatur Sipil Negara

Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Pamekasan, berwenang untuk membentuk Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu Iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Peraturan Bupati tersebut dibuat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu; *pertama*, bagaimana unsur-unsur dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021? *kedua*, bagaimana tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap pembentukan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bertumpu pada sumber data primer yaitu Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu Iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, serta Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Bahan hukum sekunder antara lain dari buku dan jurnal hukum, serta penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, kemudian data dianalisis secara deskriptif analitik.

Hasil penelitian yang didapatkan adalah *pertama*, dalam pembuatan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021, secara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 belum terpenuhi dengan baik, yaitu meliputi asas kejelasan rumusan, asas kehasilgunaan, serta asas keterbukaan. *kedua*, dari sisi perspektif *siyasah syar'iyah* terutama *siyasah tasyri'iyah* yang membahas mengenai mekanisme kebijakan yang dilaksanakan masyarakat berdasar atas ajaran syariat yang mana tujuan dari Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 telah sesuai dengan tujuan syariat yaitu memudahkan perempuan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan kewajiban masa *iddah*. Namun dalam substansi yang diatur dalam pasal 8 menyebabkan masyarakat kesulitan dalam melaksanakannya, serta terdapat Pegawai Negeri Sipil yang belum mengetahui atas Peraturan Bupati tersebut.